

PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIPOTAKARI

Nur Siti Azma AD Samat¹, Andi Astinah Adnan², Ahmad Mustanir³
^{1,2,3} Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
nrsitiazma@gmail.com, andi.astinah.adnan@umsrappang.ac.id,
ahmadmustanir74@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of budget transparency implemented by the Cipotakari village government, analyze the level of community participation in the village development planning process, and examine the effect of budget transparency on community participation in village development planning. This study employed a quantitative approach with an associative research design. The population consisted of community members who participated in the village development planning meeting (Musrembang) in cipotakari village. The sampling technique used was purposive sampling, with a total sample of 46 respondents who met the predetermined research criteria. Data were collected through questionnaires, observation, and documentation. The collected data were analyzed using SPSS software, including validity testing, simple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing.

Keywords: *Budget Transparency, Community Participation, Village Development Planning, Village Funds.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Cipotakari, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, serta mengkaji pengaruh transparansi anggaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah masyarakat yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Cipotakari. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 46 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Selanjutnya Analisis data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tahapan yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi, serta uji hipotesis.

Kata Kunci: *Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa, Dana Desa.*

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa memegang peran penting dalam mendorong pelaksanaan Pembangunan di Tingkat local. Meskipun demikian, pelaksanaan tata Kelola pemerintahan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa masih menghadapi berbagai kendala di banyak wilayah di Indonesia. Permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman aparat desa mengenai penerapan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh Masyarakat.(Susanto, 2024).

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena melalui perencanaan yang baik akan dihasilkan penyusunan program dan kegiatan Pembangunan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta aspirasi Masyarakat agar pelaksanaan lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan pembangunan adalah melalui keikutsertaan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi sarana bagi Masyarakat untuk menyampaikan usulan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak semua masyarakat mengetahui jadwal dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, bagaimana prosedur penyampaian usulan, serta siapa saja yang dapat terlibat di dalamnya.

Kondisi ini berdampak pada keterlibatan aktif masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan. Akibatnya, usulan yang masuk sering kali hanya berasal dari kelompok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan informasi juga dapat menimbulkan anggapan bahwa proses perencanaan pembangunan kurang transparan dan tidak inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menerapkan pendekatan survei sebagai metode untuk mengumpulkan data dari responden, yang bertujuan untuk memperoleh data empiris secara sistematis dan terukur. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui secara kuantitatif besarnya pengaruh variabel independen, yaitu transparansi anggaran (X), terhadap variabel dependen, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (Y).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tingkat Transparansi Anggaran di Desa Cipotakari

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 46 responden, menunjukkan bahwa tingkat transparansi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Cipotakari berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penilaian responden terhadap indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian transparansi anggaran, seperti keterbukaan informasi anggaran, kemudahan akses informasi,

kejelasan informasi, kelengkapan laporan anggaran, serta publikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Hasil pengolahan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar responden memberikan penilaian baik hingga sangat baik terhadap pelaksanaan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tingginya tingkat transparansi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cipotakari telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa. Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Kondisi ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses terkait pengelolaan keuangan publik. Temuan penelitian ini mendukung teori transparansi yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin transparan

pemerintah desa dalam menyampaikan informasi anggaran, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memahami program pembangunan yang akan dilaksanakan dan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cipotakari termasuk dalam kategori sangat baik. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, keterlibatan yang aktif dalam berbagai kegiatan perencanaan, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Persentase pada setiap indikator partisipasi masyarakat berada pada rentang 80% hingga 84%, yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam proses pembangunan desa. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat

Desa Cipotakari memiliki kesadaran dan kepedulian yang cukup tinggi terhadap pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga aktif menyampaikan usulan dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi juga mencerminkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan terhadap program pembangunan akan semakin meningkat sehingga mendorong keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Partisipasi

Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,727, yang menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat berada pada kategori kuat. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) nilai koefisien determinasi sebesar 0,529 menunjukkan bahwa transparansi anggaran mampu memberikan kontribusi sebesar 52,9% dalam menjelaskan Tingkat partisipasi Masyarakat pada proses perencanaan Pembangunan. Adapun sebesar 47,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Hasil persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan transparansi anggaran sebesar satu satuan akan meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 0,424 satuan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah sehingga semakin tinggi sehingga semakin tinggi tingkat transparansi anggaran yang diterapkan, maka semakin tinggi pula

tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,025 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh transparansi anggaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai anggaran desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui program pembangunan yang direncanakan, memahami penggunaan dana desa, serta ikut memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Semakin terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi anggaran, maka semakin tinggi pula

kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi dalam proses pembangunan desa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Cipotakari. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cipotakari perlu terus mempertahankan dan meningkatkan praktik transparansi anggaran melalui penyediaan informasi yang lebih lengkap, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

D. Kesimpulan

Tingkat transparansi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Cipotakari berada pada kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya penilaian responden terhadap keterbukaan informasi anggaran, kemudahan akses informasi, kejelasan informasi, kelengkapan laporan anggaran, penyampaian informasi mengenai anggaran kepada masyarakat telah

terlaksanakan dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan adanya Upaya pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Cipotakari juga berada pada kategori sangat baik. Yang menunjukkan tingginya Masyarakat keterlibatan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

Transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,424 yang berarti setiap peningkatan transparansi anggaran akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,529 menunjukkan bahwa transparansi anggaran

memberikan kontribusi sebesar 52,9% terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan sisanya sebesar 47,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis penelitian diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas, A. P., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2025). - Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Botto Mallangga Kabupaten Enrekang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 491–509. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6516>
- Ananda Naufal Zaki, Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang : Teori Keagenan. *Jekobs*, 2(1), 23–37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOB>
- Bawean, D. I. P. (2025). *Pulau Bawean merupakan wilayah kepulauan di Kabupaten Gresik yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata . Sektor pariwisata terintegrasi dari unsur budaya , keindahan pemandangan , tempat arkeologi dan sejarah , sosial politik dan pembangunan infrastruktur . Pulau Bawean memiliki banyak* obyek daya tarik wisata baik wisata alam , wisata budaya dan wisata edukasi . *Daya tarik wisata dan budaya Pulau Bawean antara lain : IX*, 95–118.
- Ego, I. K., & Suartana, I. W. (2025). The Influence of Transparency, Community Participation, and Clarity of Budget Targets on the Effectiveness of Village Fund Management. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 365–376. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i2.10927>.Article
- Gunawan, A. (2024). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa). *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 4(2), 93–97. <https://doi.org/10.37150/jimat.v4i2.2517>
- Hardoyo, S. R., & Setiawan, B. (2011). *PARTISIPASI MASYARAKAT ANGGOTA KOPERASI HUTAN JAYA Penelitian ini dilakukan di Hutan Jaya Lestari koperasi di Kabupaten Konawe Selatan di lihat sukses untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam develoment masyarakat hutan . Ini berhasil ditunj.* 25(2), 178–197.
- Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1>

- 209 <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa*. 15, 11–21.
- Mushofa, M., Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5937–5948.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1992>
- Ni Wayan Desi Budha Jayanti. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51–58.
<https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Raja, M. I. L. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*.
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268.
- Sukma Gusti Armaida, Usdeldi Usdeldi, & Erwin Saputra Siregar. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 01–20.
<https://doi.org/10.61132/anggara.n.v2i2.525>
- Sundari, D., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(01), 26–36.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v5i01.170>
- Susanto, D. (2024). Edukasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Melalui Pelatihan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 40–45.
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1507>
- Yulianti, R. T. (2010). *T R A N S P A R A N S I A N G G A R A N : N S P F I S I E N S U P A b s t r a c t b s t I . P e n d a h u l u a n P e n d a*. IV(2), 239–250.